

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kurun waktu dua hingga tiga tahun setelah pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, perekonomian dunia kembali menunjukkan ketidakstabilan akibat kerapuhan kondisi di berbagai negara. Buruknya tingkat keamanan dan kesehatan geopolitik dunia telah menimbulkan sejumlah permasalahan merugikan bagi negara-negara yang mempunyai perjanjian kerja sama internasional dan diplomasi dengan negara tertentu, baik negara yang bersangkutan dengan konflik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan seperti sanksi atau embargo ekonomi yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap Rusia merupakan salah satu contoh keadaan yang menciptakan ketidakstabilan inflasi dan menimbulkan ketidakpastian harga bahan pokok. Permasalahan konflik ini menjadi bahan perhatian internasional mengingat Ukraina dan Rusia memiliki peran signifikan sebagai negara pengekspor pada tingkat global (Bakrie et al., 2022).

Kerja sama yang terganggu dapat melibatkan sejumlah aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan internasional (ekspor-impor), investasi, teknologi, pendidikan, dan industri. Dampak-dampak tersebut dapat mengakibatkan perubahan dalam kondisi dan kebijakan negara konflik, yang berpotensi menyebar ke negara-negara lain secara masif. Dengan demikian, konsekuensi dari gangguan kerja sama ini bersifat universal dan berpotensi menyebar luas di seluruh dunia.

Dalam konteks perdagangan ekspor dan impor, pembatasan yang timbul akibat dari konflik antarnegara atau kawasan dapat mengakibatkan penurunan pendapatan bagi negara yang tidak terlibat dalam konflik tersebut seperti gangguan jalur perdagangan dan logistik. Dampak penurunan pendapatan ini dapat berpengaruh terhadap anggaran pemerintah, melemahkan cadangan devisa negara, dan pada gilirannya dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk mendanai pembangunan serta meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan sebagai alat pembiayaan utang luar negeri atau untuk kebutuhan impor. Ketika anggaran negara atau cadangan devisa mengalami defisit atau tidak mencukupi untuk perencanaan kebijakan pembangunan, seringkali negara berkembang seperti Indonesia mencari aset dalam bentuk utang luar negeri sebagai solusi alternatif jangka pendek untuk mengatasi keterbatasan tersebut (Satrianto, 2015).

Perselisihan geopolitik global dapat memberikan hambatan besar terhadap perdagangan internasional. Sengketa perdagangan antara negara-negara kuat, tindakan proteksionis, dan sanksi ekonomi adalah contoh konflik yang dapat menghambat akses pasar dan arus bebas perdagangan. Dalam hal ini, mempertahankan keberlanjutan dan stabilitas perekonomian menghadirkan tantangan yang sulit bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang sering mengalami peningkatan utang luar negeri karena pasar yang bergejolak dan perekonomian yang tidak menentu sehingga mendorong ketergantungan pada pinjaman luar negeri untuk pendanaan, sedangkan salah satu tujuan paling signifikan bagi negara-negara berkembang adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan ekonomi yang merata. Meskipun, karena

faktor-faktor eksternal maupun internal yang dapat menyebabkan kurangnya modal untuk berinvestasi di dalam negeri, negara-negara berkembang dapat menggunakan solusi alternatif, yaitu melalui pinjaman utang. Pemerintah pada umumnya melakukan pinjaman untuk melunasi utang lain yang telah jatuh tempo atau untuk mengisi kesenjangan antara pendapatan rendah dan pengeluaran tinggi (Malik & Kurnia, 2017). Utang luar negeri dalam konteks perekonomian dapat memberikan kelebihan dan kekurangan tersendiri terhadap negara yang mengimplementasikan kebijakan peminjaman dana asing tersebut, yaitu pembiayaan proyek yang layak dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun kekurangan yang dapat dialami oleh negara akibat peminjaman dana asing tersebut dapat berupa beban utang yang sangat besar akibat peningkatan bunga utang setiap tahun.

Utang luar negeri merupakan salah satu komponen kebijakan yang dapat digunakan oleh negara dan mempunyai dampak baik atau buruk tergantung kepada cara penggunaan dari negara tersebut dalam mengimplementasikannya, karena laju pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan utang luar negeri tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah menjalankan sistem kebijakan perekonomiannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan perekonomian terbuka, sehingga diperlukan fondasi yang kokoh agar tidak sepenuhnya terpengaruh oleh kondisi global, salah satu bentuk pengaruh tersebut adalah melalui pinjaman utang luar negeri. Sebagian besar negara berkembang memanfaatkan utang luar negeri untuk mendukung pembangunan mereka, meskipun tidak sedikit negara yang menghadapi konsekuensi dari utang luar negeri yang dapat menjadi perangkap yaitu debt trap.

Kapasitas suatu negara dalam melunasi utangnya di masa mendatang, mutlak diperhitungkan sebelum memutuskan untuk menerima pinjaman luar negeri (Cyrillus, 2002). Mengimplementasikan kebijakan utang luar negeri yang bijaksana dengan memperhitungkan secara seksama pada proyeksi jangka panjang dan masa depan, dapat menjadi kunci utama dalam mencegah jebakan utang.

Tabel 1. 1 Indikator Makroekonomi Indonesia 5 Tahun Terakhir

Tahun	Utang Luar Negeri (Miliar USD)	Defisit APBN (Miliar USD)	Cadangan Devisa (Miliar USD)	PDB (Miliar USD)
2018	379,5	-22,5	120,6	1,042
2019	402	-21,2	129	1,119
2020	417	-73,6	135,9	1,059
2021	416,4	-70,5	144,9	1,186
2022	396,6	-53,4	137	1,319

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel indikator variabel makroekonomi diatas dapat dilihat bahwa pada 5 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami gejolak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pada tahun 2020-2021 merupakan kondisi dimana Indonesia sedang mengalami kontraksi perekonomian akibat tantangan global pandemi COVID-19 yang ditunjukkan pada peningkatan yang cukup signifikan pada utang luar negeri dan defisit APBN, hal tersebut dikarenakan pemerintah Indonesia merespons dengan program stimulus ekonomi yang luas untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pemulihan. Selain itu, peningkatan belanja untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial juga memerlukan tambahan sumber pendanaan sehingga menyebabkan peningkatan utang luar negeri Indonesia pada periode tersebut.

Defisit APBN yang tinggi pada periode 2020-2021 juga disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan penurunan pendapatan negara karena

berbagai sektor ekonomi terpengaruh seperti pariwisata, perdagangan, dan industri. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah meningkat dengan signifikan karena untuk menangani dampak sosial dan ekonomi dari pandemi, seperti bantuan sosial, stimulus ekonomi, serta peningkatan belanja kesehatan. Kombinasi antara pendapatan yang menurun dan pengeluaran yang meningkat mengakibatkan defisit APBN yang tinggi. Penurunan aktivitas ekonomi selama pandemi seperti lockdown juga mengakibatkan penurunan pendapatan dari pajak. Sementara itu, pemulihan ekonomi yang lambat juga dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak dengan tingkat yang sama seperti sebelum pandemi.



Sumber : World Bank

Gambar 1. 1 Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia 1990-2022

Dari gambar grafik di atas, dapat diketahui bahwa utang luar negeri Indonesia mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 1999 hingga 2021, dengan pertumbuhan yang lebih pesat terutama setelah tahun 2000, dan lonjakan yang

mencolok setelah tahun 2008-2020. Analisis ini menunjukkan bahwa pasca orde baru runtuh hingga munculnya era reformasi, kebijakan utang luar negeri Indonesia lebih terfokus pada peningkatan utang. Hal tersebut dikarenakan pemerintah memiliki tujuan baru yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan memperbesar modal melalui utang luar negeri untuk sebagai pembiayaan dalam berinvestasi dengan proyek yang lebih besar melalui kebijakan sistem defisit anggaran.

Pembangunan infrastruktur, pembangunan industri, dan pembelian alat-alat militer menjadi kebutuhan penting bagi negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai keinginan untuk menarik investasi jangka panjang dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan jaringan listrik merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk memfasilitasi transportasi barang dan tenaga kerja, memperlancar distribusi produk, serta meningkatkan konektivitas antara wilayah-wilayah dalam negeri (Suriani & Keusuma, 2015). Pembangunan sektor industri menjadi kunci dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, karena industri dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk domestik, dan meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara. Investasi dalam pembangunan industri, terutama berbasis teknologi dan inovasi, dapat menarik investor jangka panjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keberadaan kekuatan militer yang kuat dapat memberikan keamanan dan stabilitas bagi suatu negara. Keamanan yang dijamin oleh kekuatan militer dapat menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan meningkatkan kepercayaan

investor dalam jangka panjang terhadap potensi ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan utang luar negeri yang dikelola dengan baik dan digunakan untuk efektivitas pembangunan dapat bermanfaat dalam investasi jangka panjang karena akan meningkatkan daya tarik bagi investor asing dalam mencari lingkungan bisnis yang kondusif.

Kaum keynesian berpendapat bahwa alasan utama pemerintah melakukan pinjaman ke luar negeri adalah tingginya defisit anggaran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan (Fadillah & Sutjipto, 2018). Pada masa Orde Baru, Indonesia menganut sistem anggaran berimbang. Namun, seiring dengan keinginan pemerintah untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka pengeluaran pemerintah perlu ditingkatkan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur besar. Meskipun demikian, pendapatan negara tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Alhasil, sistem defisit anggaran akhirnya diterapkan setelah orde baru runtuh. Mengingat sumber pendapatan negara tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran dalam sistem anggaran defisit seperti yang digunakan di Indonesia, utang merupakan sumber pembiayaan yang tidak dapat dihindari.

Keterbatasan pengaruh yang dimiliki oleh negara-negara berkembang seringkali menjadi penyebab ketergantungan terhadap negara maju ketika melakukan ekspor dan impor yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan berupa devisa negara (Permata Sari & Ibrahim, 2023). Hal tersebut dikarenakan keterbatasan sumber daya seperti manusia dan teknologi yang dimiliki negara berkembang seperti Indonesia sehingga melakukan impor terhadap negara maju dalam rangka mengatasi gap permasalahan yang terjadi. Akan tetapi, Jika suatu

negara mengalami kurangnya ekspor terhadap impor maka dapat terjadi pembengkakan defisit neraca transaksi berjalan, sehingga menjadi penyebab menipisnya cadangan devisa atau pendapatan negara yang digunakan sebagai pembiayaan impor atau keperluan lain. Kebijakan utang luar negeri menjadi salah satu pilihan solusi jangka pendek negara dalam mendapatkan dana tambahan untuk mengatasi menipisnya cadangan devisa negara dan meningkatkan kapasitas cadangan devisa serta investasi sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Atmadja, 2000).

Negara pada dasarnya menggunakan cadangan devisa sebagai aset untuk mendanai komitmennya dalam memberikan pengaruh terhadap kebijakan moneter, sehingga membantu menjaga stabilitas perekonomian. Utang yang berasal dari pinjaman luar negeri dapat meningkatkan cadangan devisa negara apabila diinvestasikan secara menguntungkan dan menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Sebaliknya, jika kebijakan investasi yang dilakukan tidak menguntungkan sehingga tidak dapat menopang suku bunga pinjaman yang tinggi, maka pinjaman luar negeri tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas cadangan devisa. Cadangan devisa merupakan indikator moneter yang sangat penting untuk menunjukkan kuat atau lemahnya fundamental perekonomian suatu negara. Selain itu, cadangan devisa dalam jumlah yang cukup merupakan salah satu jaminan tercapainya stabilitas moneter dan perekonomian makro suatu negara (Tambunan, 2001).

Negara-negara berkembang seringkali memerlukan aliran modal yang signifikan untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi. Salah satu sumber utama aliran modal ini adalah utang luar negeri, yang sering dipilih sebagai opsi karena keterbatasan sumber daya domestik. Negara berkembang memerlukan sebuah aliran modal seperti utang luar negeri dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonominya (Darmawan, 2022). Tidak mudah dalam melakukan transisi dari negara berkembang ke negara maju, dikarenakan membutuhkan pendukung-pendukung seperti infrastruktur, ketahanan perekonomian dan kestabilan daya beli masyarakat dengan keterbatasan dana modal yang ada. Dalam pandangan Keynes, akumulasi modal (investasi) mempunyai efek tambahan untuk meningkatkan anggaran pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan total. Dalam jangka pendek, kebijakan untuk mengisi defisit anggaran dengan utang luar negeri dapat menguntungkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, kondisi geopolitik dunia yang sedang mengalami ketidakstabilan memaksa Indonesia sebagai negara berkembang untuk membuat pilihan ekstra dalam mengimplementasikan kebijakan ekonominya, terganggunya arus pemasukan melalui perdagangan internasional yang menjadi salah satu sumber pendapatan menyebabkan Indonesia melihat kembali opsi utang luar negeri sebagai solusi dalam pembiayaan pembangunan negara. Namun, Indonesia harus lebih berhati-hati dalam menentukan arah kebijakannya dan mempersiapkan segala sesuatu secara matang, sebab jika tidak berhati-hati dalam penentuan arah kebijakan yang diimplementasikan maka dapat mendorong perekonomian Indonesia semakin kearah negatif hingga terjadinya debt overhang. Utang luar negeri merupakan sebuah kunci yang memiliki peran penting

berdasarkan kebijakan pemakaiannya, jika utang luar negeri tersebut digunakan dengan baik dalam mendukung dan mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena hal tersebut, maka penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Indonesia Pendekatan Vector Error Correction Model (VECM)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peran dan perkembangan utang luar negeri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor ekonomi. Maka permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh defisit APBN terhadap utang luar negeri Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?
2. Bagaimana pengaruh cadangan devisa terhadap utang luar negeri Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?
3. Bagaimana pengaruh PDB terhadap utang luar negeri Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dideskripsikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh defisit APBN terhadap utang luar negeri Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek.

2. Menganalisis pengaruh cadangan devisa terhadap utang luar negeri Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek.
3. Menganalisis pengaruh PDB terhadap utang luar negeri Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan mampu memiliki manfaat yaitu:

1. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan untuk pemerintah dalam mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi utang luar negeri Indonesia, sehingga dalam tahun-tahun yang mendatang, pemerintah dapat memunculkan dan mengaplikasikan kebijakan yang berguna untuk meminimalkan risiko pengaruh utang luar negeri secara berkepanjangan.
2. Hasil penelitian diharapkan mampu memperluas pandangan serta wawasan mengenai pentingnya ilmu ekonomi.
3. Hasil penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi, informasi, dan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi utang luar negeri Indonesia.